



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

SALINAN



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 251 /KUM/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
 - c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
 - d. Bab IV Penutup.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 dapat diselesaikan. Tersusunnya Renja Perubahan ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renja Perubahan ini hingga selesai.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi segenap unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Martapura, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banjar,



Hj. ST. MAHMUDAH, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19751108 199903 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.1 Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I ..	10
BAB III.....	36
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB IV.....	74
PENUTUP.....	74
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2025	74
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	74
4.3 Rencana Tindak Lanjut	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada saat pelaksanaan rencana kerja ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya perubahan rencana kerja untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Adapun hal – hal yang mendasari perubahan renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2025 ini, sebagai berikut :

- 1) Renstra Disnakertrans 2025-2029 menyesuaikan Pokin terbaru sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Banjar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 disusun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dengan karakter efektif, efisien, transparan, partisipatif, akuntabel berdasarkan kerangka hukum adil dan responsive. Selain itu, Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan target kinerja program dan kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Banjar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERINGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besari rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Perubahan Indikator Kinerja;
- Jumlah program dan jumlah kegiatan ;
- Total kebutuhan dana /pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya;
- Alasan dilakukan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025 memiliki 5 (lima) program utama dan 1 (satu) program pendukung dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Utama

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
2. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian
 - Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota
 - Pelayanan antar Kerja;
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - Job Fair/Bursa Kerja

3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

d. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

e. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan;
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
 - 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- f. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 7. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Dari 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan utama dan 18 (delapan belas) Sub kegiatan pendukung, target kinerja hasil/keluaran yang dicapai sampai dengan Triwulan I mencapai untuk Realisasi Keuangan sebesar 14,56% dan Realisasi Fisik mencapai 16,56%. Uraian lebih lengkap mengenai capaian target kinerja program/kegiatan disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025, terdapat catatan penting antara lain:

- 1. **Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD .

Hambatan tidak tercapainya pada sub kegiatan ini karena pelaksanaannya pada triwulan III, namun pada triwulan II yaitu pada bulan Juni penyusunan pada tahap perencanaan RKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hambatan pada sub kegiatan ini karena laporan keuangan terlaksana pada bulan Desember, sebagai bahan untuk pelaporan yaitu dengan adanya pelaporan tiap bulan dan rekonsialisasi dengan akuntansi dan asset.

B. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

indikator : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n.

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, target 528 orang, realisasi masih 32 orang 2 kegiatan pelatihan yang terlaksana;

Faktor Penghambat:

- Pada Bulan Januari dokumen DPA 2025 belum terbit atau belum ditandatangani, sehingga dalam pengerjaan SPJ kegiatan masih terkendala

- Untuk administrasi kelengkapan SPJ belum lengkap dikarenakan menunggu peserta pelatihan mengumpulkan data diri untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan di bulan Maret.
- Pelatihan akan gencar dilaksanakan di triwulan II.

Rencana Tindak Lanjut:

- Jadwal pelatihan dilaksanakan di triwulan II.
- Pelaksanaan evaluasi terhadap teknis pelaksanaan pelatihan.
- Pelaksanaan koordinasi ke desa.
- Koordinasi dengan Instansi terkait dan LPK dalam persiapan kegiatan berjalan dengan lancar - Peserta antusias dalam mengikuti pelatihan.
- Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
kegiatan ini karena perencanaan kegiatan (arus kas) pada triwulan IV (Bulan Oktober).

C. Program Perencanaan Tenaga Kerja

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Indikator kegiatan: Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Target sub kegiatan ini belum tercapai, dikarenakan Beberapa perusahaan masih dalam proses menyusun Dokumen RTK Mikro.

Faktor Penghambat

- Tidak adanya kewenangan/intervensi dalam pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak membuat RTK mikro.

Rencana Tindak Lanjut:

- kegiatan akan dilaksanakan di TW III / IV, namun proses penyusunan RTK sejak triwulan I sudah berjalan;
- Laksanakan Sesuai dengan jadwal dan monitoring progress dari perusahaan.

D. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan: Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
Target sub kegiatan ini belum tercapai, dikarenakan Tidak adanya tenaga kerja disabilitas yang dilayani di ULD.

Faktor Penghambat

- Penyandang Disabilitas yang dilayani melalui Unit Layanan Disabilitas masih minim dikarenakan keberadaan layanan ini belum banyak diketahui.

Rencana Tindak Lanjut:

- Berkolaborasi dengan pemberi kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung ULD.

b. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Indikator kegiatan: Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perlindungan

- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Faktor Penghambat

- Dokumen persyaratan yang diserahkan terkadang belum lengkap dan perlu dilengkapi kembali.

Rencana Tindak Lanjut:

- koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
Faktor Penghambat

- Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV (Bulan Oktober);

Rencana Tindak Lanjut:

- koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

E. Program Hubungan Industrial

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan : Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, Target sampai dengan Triwulan I sebanyak 8 Perusahaan realisasi masih 4 Perusahaan, belum mencapai target dikarenakan:

Faktor penghambat :

- Terbatasnya mobilisasi,
- Masih Kurangnya kesadaran perusahaan untuk membuat PP
- kurangnya/lemahnya perhatian akan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja

2.2. **Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator kegiatan : Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan : Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Indikator kegiatan : Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan : Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. Program Penempatan Tenaga Kerja

- a. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota

Indikator kegiatan: Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar

- Pelayanan Antar Kerja

- b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan: Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar

- Pemeliharaan dan operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- Job Fair/Bursa Kerja

D. Program Hubungan Industrial

- a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan: Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat

berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

- Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman.

2.3. Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Persentase Adminirtrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

A. PROGRAM TENAGA KERJA

b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja online

4. Program/Kegiatan Yang Tercapai Disebabkan Oleh :

- Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- Dana tersedia dengan anggaran kas kegiatan

- Pedoman pelaksanaan dan SDM memenuhi
- Perencanaan yang matang dan tim yang terampil dan kolaboratif

Program/Kegiatan Yang Tidak Tercapai Disebabkan Oleh :

Pada program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga kerja dalam perhitungan pencapaian target masih merujuk pada data BPS tahun 2022 sehingga belum bisa dihitung secara real. Pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi peserta pelatihan baru terlaksana sebanyak 32 orang, sedangkan target pada triwulan I yaitu 160 orang. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM dan terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan kerja, selain itu Masih dibawah Koordinasi dengan PKK Kab Banjar, yang akan melaksanakan pelatihan di triwulan II.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Implikasi yang mungkin timbul terhadap target capaian program renstra dinas tenaga kerja dan transmigrasi bisa melibatkan berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan pengembangan daerah. Dampak positifnya dapat mencakup Tingkat Kesempatan Kerja, pemulihan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat, namaun implikasi negative juga bisa muncul, kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Penting untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari program tersebut secara berkelanjutan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya telah tercapai bahkan melebihi dari target sampai dengan triwulan I, tentu berdampak baik terhadap capaian periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Disnakertrans Kabupaten Banjar. Dengan tercapainya target Renja 2025 dan konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan target

akhir periode Renstra bisa seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah direncanakan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realisasinya masih belum tercapai hingga triwulan I, yang disebabkan perhitungan dari target-target tersebut berada di triwulan III maupun IV akan berdampak terhadap pencapaian target periode akhir pada dokumen Reviu Renstra Disnakertrans Kabupaten Banjar. Berbagai upaya terbaik telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program, kegiatan maupun sub kegiatan dan dilihat dari progres kinerja maka optimis target periode akhir Renstra Disnakertrans untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan bisa tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana waktu dan anggaran kas yang telah direncanakan.
 - Menyampaikan informasi melalui media sosial atau website mengenai rekrutmen peserta pelatihan
 - Mengadakan pelatihan dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan keperluan pasar kerja dan memaksimalkan durasi pelatihan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Banjar

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tri II Tahun 2024 (%)	
										Triwulan I									
1	2	3	4	5		6		7		8		10		11		12=10+6		13 = (12 / 5) * 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Indeks	85	28,569,833,034	91,65	7.360.101.569	86	6.804.553.758	-	1.241.969.054	0	1.241.969.054	-	18,25	91,65	8.602.070.623	107,82	30,10892858
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat	Persen	100	425,412,900	100	52.608.700	100	93.319.200	25	10.080.000	25	10.080.000	25,00	10,80	125	62.688.700	125,00	15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	43	35,071,500	9	13.139.900	9	21.733.000	5	5.040.000	5	5.040.000	55,56	23,19	14	18.179.900	32,56	51,8366765

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	97,738,500	1	3.807.500	1	5.438.700	-	1.680.000	0	1.680.000	-	30,89	1	5.487.500	20,00	5,614471268
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	59,197,500	1	3.306.300	1	5.399.700	-	-	0	-	-	0,00	1	3.306.300	20,00	5,585202078
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	76,126,500	1	5.499.800	1	5.760.000	-	-	0	-	-	0,00	1	5.499.800	20,00	7,224553868
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	63,307,900	1	4.499.800	1	5.330.000	-	-	0	-	-	0,00	1	4.499.800	20,00	7,107801712
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	51,899,500	3	11.466.800	3	20.703.000	3	1.680.000	3	1.680.000	100,00	8,11	6	13.146.800	40,00	25,33126523

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	95	42,071,500	19	10.888.600	19	11.071.800	4	-	4	-	21,05	0,00	23	10.888.600	24,21	25,88117847
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1	7.915.500		-		-	-	0,00	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50	9.967.500		1.680.000		1.680.000	-	16,85	0	1.680.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	1	23,385,995,734	100	4.099.144.450	100	4.949.557.500	25	992.334.681	25	992.334.681	25,00	20,05	125	5.091.479.131	12500,00	21,77148747
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	19,921,391,734	29	3.943.000.350	35	4.734.500.000	26	976.434.681	26	976.434.681	74,29	20,62	55	4.919.435.031	211,54	24,6942337
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60		12	128.040.000	12	184.850.000	1	15.900.000	1	15.900.000	8,33	8,60	13	143.940.000	21,67	#DIV/0!
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	105	-	-	-			-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	76,649,500	1	9.314.800	1	7.822.000	3	-	3	-	300,00	0,00	4	9.314.800	80,00	12,15246022

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	60	-	25	18.789.300	16	22.385.500	-	-	0	-	-	0,00	25	18.789.300	41,67	#VALUE!
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Disediakan	Persen	100	-		-		-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#VALUE!	0,00	#VALUE!
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	-		-		-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#VALUE!	0,00	#VALUE!
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100	377,957,768	100	69.102.747	100	80.000.000	25	-	25	-	25,00	0,00	125	69.102.747	125,00	18,28319269
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	370,000,000	7	69.102.747	5	80.000.000	-	-	0	-	-	0,00	7	69.102.747	20,00	18,67641811

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran	Persen	1	2,587,091,332	100	1.399.782.415	100	478.835.220	25	75.438.342	25	75.438.342	25,00	15,75	125	1.475.220.757	1250,00	57,02236866
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20		5	6.935.000	5	14.567.500	1	2.302.000	1	2.302.000	20,00	15,80	6	9.237.000	30,00	#DIV/0!
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	94,035,700	3	901.762.650	3	127.595.720	-	-	0	-	-	0,00	3	901.762.650	16,67	958,9577682
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	157,365,000	12	53.174.300	12	44.368.000	1	5.150.000	1	5.150.000	8,33	11,61	13	58.324.300	108,33	37,06306993
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	102,475,000	12	14.976.000	12	22.532.000	4	4.981.000	4	4.981.000	33,33	22,11	16	19.957.000	133,33	19,4749939
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	60	6,300,000	12	1.080.000	12	1.498.000	3	180.000	3	180.000	25,00	12,02	15	1.260.000	25,00	20
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	12		12	11.006.700	12	29.999.000	-	-	0	-	-	0,00	12	11.006.700	100,00	#DIV/0!
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	2,225,715,632	12	410.847.765	12	238.275.000	3	62.825.342	3	62.825.342	25,00	26,37	15	473.673.107	25,00	21,28183404

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	850,350,300	100	622.205.196	100	757.673.838	25	147.692.731	25	147.692.731	25,00	19,49	125	769.897.927	125,00	90,53891402
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	647,050,300	12	71.258.883	12	155.557.638	3	14.662.731	3	14.662.731	25,00	9,43	15	85.921.614	31,25	13,27896981
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	159,800,000	12	17.495.000	12	43.160.000	1	5.530.000	1	5.530.000	8,33	12,81	13	23.025.000	27,08	14,40863579
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	43,500,000	12	533.451.313	12	558.956.200	4	127.500.000	4	127.500.000	33,33	22,81	16	660.951.313	33,33	1519,428306
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persen	100	943,025,000	100	1.117.258.061	100	445.168.000	25	16.423.300	25	16.423.300	25,00	3,69	125	1.133.681.361	125,00	120,2175299
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	136,000,000	1	23.280.000	1	42.750.000	0.25	6.103.300	0.25	6.103.300	#VALUE!	14,28	#VALUE!	29.383.300	#VALUE!	21,60536765

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	504,300,000	3	72.573.061	3	164.360.000	0.75	10.320.000	0.75	10.320.000	#VAL UE!	6,28	#VAL UE!	82.893.061	#VAL UE!	16,43725183
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	302,725,000	2	1.021.405.000	2	238.058.000	0.5	-	0.5	-	#VAL UE!	0,00	#VAL UE!	1.021.405.000	#VAL UE!	337,4035841
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Persen	100	293,920,000	42,1	35.347.542	42.1	30.200.000	-		0		#VAL UE!	0,00	42,1	35.347.542	42,10	12,02624592
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikro yang Disusun	Dokumen	19	293,920,000	4	35.347.542	4	30.200.000	-		0		-	0,00	4	35.347.542	21,05	12,02624592
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Orang	33	193,920,000	8	35.347.542	8	30.200.000	-		0		-	0,00	8	35.347.542	24,24	18,22789913
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Rupiah / Jam	23100	598,476,707	23.303	1.029.051.550	22.884	1.772.652.000	23,303	114.452.000	23,303	114.452.000	0,10	6,46	23326	1.143.503.550	100,98	191,0690152
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi	Persen	9.4	475,384,571	13.28	1.004.991.300	9,2	1.749.424.000	13,65	111.139.000	13,65	111.139.000	148,37	6,35	#VAL UE!	1.116.130.300	#VAL UE!	234,7847129

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	240	470,384,571	368	1.004.991.300	528	1.749.424.000	32	111.139.000	32	111.139.000	6,06	6,35	400	1.116.130.300	166,67	237,2803805
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Persen	6.42	13,446,944	5.35	24.060.250	3,85	23.228.000	-	3.313.000	0	3.313.000	-	14,26	#VAL UE!	27.373.250	#VAL UE!	203,5648397
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktifitas	Perusahaan	25	13,446,944	25	24.060.250	20	23.228.000	-	3.313.000	0	3.313.000	-	14,26	25	27.373.250	100,00	203,5648397
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	54	1,978,552,696	37.9	239.474.000	34	467.328.100	19,20	2.890.000	19,2	2.890.000	56,47	0,62	#VAL UE!	242.364.000	#VAL UE!	12,24956002
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	Lowongan	900	656,676,039	389	37.094.000	200	51.050.000	30	-	30	-	15,00	0,00	419	37.094.000	46,56	5,648751865
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Orang	300	57,000,000	389	7.800.000	80	14.300.000	30		30		37,50	0,00	419	7.800.000	139,67	13,68421053

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyelenggaraa n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	120	339,370, 000	36	29.294.0 00	30	36.750.0 00	1		1		3,33	0,00	37	29.294.0 00	30,83	8,63187 6713
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar	Orang	450 0	1,041,92 8,480	102 6	148.216. 500	900	207.482. 000	156	2.890.00 0	156	2.890.00 0	17,3 3	1,39	1182	151.106. 500	26,27	14,5025 7891
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokum en	16	294,000, 000	4	24.470.5 00	4	12.537.0 00	-	2.890.00 0	0	2.890.00 0	-	23,0 5	4	27.360.5 00	25,00	9,30629 2517
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	430 0	267,928, 480	102 6	17.380.0 00	120 0	51.085.0 00	156		156		13,0 0	0,00	1182	17.380.0 00	27,49	6,48680 5733
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	400	480,000, 000	132	106.366. 000	100	143.860. 000	-		0		-	0,00	132	106.366. 000	33,00	22,1595 8333
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perlindungan	Persen	100	279,948, 177	100	54.163.5 00	100	208.796. 100	100	-	100	-	100, 00	0,00	200	54.163.5 00	200,0 0	19,3476 8805
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	570	39,954,7 77	120	38.375.5 00	120	181.918. 600	2		2		1,67	0,00	122	38.375.5 00	21,40	96,0473 3872

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	230	239,993,400	60	15.788.000	60	26.877.500	-		0		-	0,00	60	15.788.000	26,09	6,578514242
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	55	936,501,992	36.18	1.143.692.100	35	2.287.901.500	4,80	431.106.600	4,8	431.106.600	13,71	18,84	#VAL UE!	1.574.798.700	#VAL UE!	168,1575387
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan perusahaan (PP) yang disahkan, PKWT yang dicatatkan, BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan	Persen	60	398,475,000	39.84	46.614.500	40	76.887.000	1,06	2.345.000	1,06	2.345.000	2,65	3,05	#VAL UE!	48.959.500	#VAL UE!	12,28671811
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	115	197,475,000	20	43.775.000	30	35.408.000	4	1.118.000	4	1.118.000	13,33	3,16	24	44.893.000	20,87	22,73351057

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Lapora n	16	85,000,0 00	4	2.839.50 0	4	41.479.0 00	-	1.227.00 0	0	1.227.00 0	-	2,96	4	4.066.50 0	25,00	4,78411 7647
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Persen	100	554,266, 992	100	1.097.07 7.600	100	2.211.01 4.500	100	428.761. 600	100	428.761. 600	100, 00	19,3 9	200	1.525.83 9.200	200,0 0	275,289 5666
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	112	92,000,0 00	50	84.387.5 00	30	63.857.5 00	1		1		3,33	0,00	51	84.387.5 00	45,54	91,7255 4348

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang terselesaikan	Perkara	112	119,760,000	11	42.181.900	30	29.805.300	-	21.175.000	0	21.175.000	-	71,04	11	63.356.900	9,82	52,90322311
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	460	189,266,992	8303	970.508.200	10000	2.117.351.700	10.000	407.586.600	10000	407.586.600	100,00	19,25	18303	1.378.094.800	3978,91	728,1221017
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Ex.Transmigrasi	Persen	31.5	278,732,164	31.58	202.015.000	31,58	261.746.500	-	3.699.500	0	3.699.500	-	1,41	#VAL UE!	205.714.500	#VAL UE!	73,80364614
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Kawasan Wilayah	20	454,375,102	6	202.015.000	4	261.746.500	-	3.699.500	0	3.699.500	-	1,41	6	205.714.500	30,00	45,27415765
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Yang Dibina	Kepala Keluarga	160	173,732,164	112	202.015.000	112	261.746.500	-	3.699.500	0	3.699.500	-	1,41	112	205.714.500	70,00	118,4089896

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman Yang Dikembangkan Dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	9	280,642,938			0	-		-		-	#DIV /0!	#DIV /0!		-	0,00	0
--	---	---	-------------------	---	-------------	--	--	---	---	--	---	--	---	----------	----------	--	---	------	---

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2025.

- Perubahan target pada beberapa Sub kegiatan
- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan setelah perubahan rencana kerja yaitu 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan utama dan 18 (delapan belas) Sub kegiatan pendukung.
- Total kebutuhan dana setelah hasil Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 11.624.381.858 (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan sumber dana berasal dari DAU.

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
2. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.

b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian.
 - Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten /kota
 - Pelayanan antar Kerja;
 - Penyelenggaraan unit disabilitas ketenagakerjaan.
2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
 - Job Fair/Bursa Kerja.
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Pelindungandan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

d. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.
 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

e. Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan;
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

f. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Bahan logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD ;

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD ;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Alasan dilakukannya Perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran pada renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada Tahun anggaran 2025 ini, sebagai berikut :

- 1) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025-2029 sehingga perlu menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program, kegiatan, indikator dan target sub kegiatan yang menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dituangkan di dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025-2029.
- 2) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilakukan perubahan renja dengan melakukan:
 - Pergeseran anggaran pada rekening belanja dalam kegiatan
 - Pergeseran pada rekening belanja antar program
 - Perubahan indikator anggaran pada rekening belanja antar kegiatan
 - Pergeseran anggaror program/kegiatan /sub kegiatan

Rumusan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diliat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banjar Tahun 2025

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Predikat	85	86	7.056.468.288	6.804.553.758	Penyesuaian pagu karena adanya efisiensi belanja operasional tanpa mengurangi capaian target.
keg	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	100	107.338.200	93.319.200	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	9	23.449.500	21.733.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	dokumen	1	1	5.438.700	5.438.700	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Rp	Rp	
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	5.805.700	5.399.700	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	5.760.000	5.760.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	5.330.000	5.330.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
								Rp	Rp	
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	3	20.703.000	20.703.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	19	16	11.071.800	11.071.800	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1	1	10.000.000	7.915.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	50	50	19.779.500	9.967.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
keg								Rp	Rp	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	Persen	100	100	4.970.821.500	4.949.557.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	30	35	4.734.500.000	4.734.500.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	202.560.000	184.850.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	7.822.000	7.822.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	laporan	25	18	25.939.500	22.385.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				Rp	Rp	
keg	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase Adminitrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persen	100	100	100.000.000	80.000.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	5	100.000.000	80.000.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
keg	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraa n penunjang administrasi umum perkantoran	Persentase penyelenggaraa n penunjang administrasi umum perkantoran	Persen	100	100	653.644.450	478.835.220	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	5	5	14.567.500	14.567.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan				Rp	Rp	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	133.239.650	127.595.720	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	48.945.500	44.368.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	25.394.800	22.532.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	1.498.000	1.498.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	29.999.000	29.999.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	400.000.000	238.275.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
								Rp	Rp	
keg	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	770.176.638	757.673.838	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	155.557.638	155.557.638	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	43.160.000	43.160.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	571.459.000	558.956.200	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan Yang Berkualitas	Persen	100	100	454.487.500	445.168.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	42.750.000	42.750.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	164.360.000	164.360.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	247.377.500	238.058.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase dokumen Perencanaan	Persentase dokumen Perencanaan	Persen	68,42	68,42	50.000.000	30.200.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Renstra baru, diselaraskan dengan kemampuan SDM perusahaan dalam menyusun RTK mikro.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
			Tenaga Kerja yang tersusun	Tenaga Kerja yang tersusun				Rp	Rp	
keg	2.07.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikryang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikryang Disusun	dokumen	5	34% 5 dokumen	50.000.000	30.200.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
	2.07.02.2.01	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	orang	10	3	50.000.000	30.200.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tingkat Kemampuan Tenaga Kerja dan Peserta Pelatihan Kerja menghasilkan produk barang/jasa	Rp /Jam Persen	Rp2 3.096	12,50%	1.883.735.000	1.772.652.000	Penurunan pagu karena efisiensi biaya pelatihan, namun target capaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja.
keg	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan ang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi	Persentase lulusan pelatihan ang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi Memiliki Kompetensi/Keterampilan	Persen	9,2	52,8	1.858.558.000	1.749.424.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	560	528	1.858.558.000	1.749.424.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
keg	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Persen	4,14	2,5	25.177.000	23.228.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	20	20	25.177.000	23.228.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri)	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	34	97	604.026.100	467.328.100	Penyesuaian target untuk mendukung realisasi Renstra baru dan kondisi riil pasar kerja daerah.
keg	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di	lowongan	200	175	70.000.000	51.050.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Kabupaten/Kota	wilayah Kabupaten Banjar	wilayah Kabupaten Banjar				Rp	Rp	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	80	90	25.000.000	14.300.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	orang	30	30	45.000.000	36.750.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	orang	950	950	248.915.000	207.482.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	dokumen	4	4	30.200.000	12.537.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	1200	1400	68.715.000	51.085.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
								Rp	Rp	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	100	100	150.000.000	143.860.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
keg	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitas Perlindungan	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitas Perlindungan	Persen	100	100	285.111.100	208.796.100	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	120	120	223.838.600	181.918.600	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	orang	60	60	61.272.500	26.877.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang	Persentase perusahaan yang	Persen	35	40	2.434.916.300	2.287.901.500	Penyesuaian target perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak mengikuti dinamika regulasi ketenagakerjaan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
			menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	menerapkan tata kelola kerja yang layak				Rp	Rp	
keg	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peraturan perusahaan (PP) yang disahkan, PKWT yang dicatatkan, BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan.	Persentase Peraturan perusahaan (PP) yang disahkan, PKWT yang dicatatkan, BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan.	Persen	40	4,33	152.905.000	76.887.000	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan	Perusahaan	30	30	36.386.000	35.408.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
			Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				Rp	Rp	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan	1	1	116.519.000	41.479.000	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
keg	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Persen	100	100	2.282.011.300	2.211.014.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	30	30	122.110.500	63.857.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	30	30	34.170.300	29.805.300	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
	tidak dilaksanakan	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi Serikat Pekerja	11	11	0	0	tidak dilaksanakan. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan rasionalisasi belanja sesuai skala prioritas.
	tidak dilaksanakan	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	0	0	tidak dilaksanakan. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan rasionalisasi belanja sesuai skala prioritas.
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	10000	10000	2.125.730.500	2.117.351.700	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase pengembangan kawasan ex. transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Mandiri	Persen	26,31	18,75	289.661.500	261.746.500	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
keg	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Jumlah Transmigran Yang mendapatkan informasi Pelatihan Kerja Jumlah Transmigran Yang Menghasilkan Produk Barang/Jasa	Kawasan Wilayah horang	5 Kawasan Wilayah	160 Orang 24 orang	289.661.500	261.746.500	Penyesuaian target dari Renstra sebelumnya ke Target pada Renstra baru
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	128	128	289.661.500	261.746.500	Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
	tidak dilaksanakan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	3	3	0	0	Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan tidak dilaksanakan karena fokus diarahkan pada pembinaan SDM transmigran.

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

No	Program/Kegiatan		INDIKATOR KINERJA		Target			Pagu MURNI	Pagu EFISIENSI	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Satuan	Sebelum	Sesudah			
		Total Pagu						12.318.807.188	11.624.381.858	

3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnakertrans Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Sosial		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,70
		Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri)	%	38
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Sosial dan Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Hubungan Industrial	%	24,06
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,30

Tabel 3.2
Renja Perubahan 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18	19
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi							12.053.888.223,00	12.318.807.188,00	11.624.381.858,00			13.458.176.100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.764.226.723,00	12.029.145.688,00	11.362.635.358,00			13.008.176.100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							11.764.226.723,00	12.029.145.688,00	11.362.635.358,00			13.008.176.100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				85	86 Nilai	6.882.549.323,00	7.056.468.288,00	6.804.553.758,00			7.543.176.100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 Persen	100 % A Predika t	107.338.200,00	107.338.200,00	107.338.200,00			107.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokume n	9 Dokum en	23.449.500,00	23.449.500,00	21.733.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		18.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.438.700,00	5.438.700,00	5.438.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.805.700,00	5.805.700,00	5.399.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.330.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.703.000,00	20.703.000,00	20.703.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		13.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan Laporan	16 Laporan	11.071.800,00	11.071.800,00	11.071.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.915.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				50 Data	50 Data	19.779.500,00	19.779.500,00	9.967.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		20.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	-			100 Persen	100 % A Predikat	4.636.902.535,00	4.970.821.500,00	4.970.821.500,00			5.169.176.100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.400.581.035,00	4.734.500.000,00	4.754.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		5.000.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	202.560.000,00	202.560.000,00	184.850.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		125.193.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.822.000,00	7.822.000,00	7.822.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		11.421.100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	18 Laporan	25.939.500,00	25.939.500,00	22.385.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		32.562.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawian Yang Berkualitas	-			100 Persen 5 Orang	100 % A Predikat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			150.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Yang Berkualitas	-			100 Persen	100 % A Predikat	813.644.450,00	653.644.450,00	653.644.450,00			717.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	14.567.500,00	14.567.500,00	14.567.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		20.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	193.239.650,00	133.239.650,00	156.027.720,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.945.500,00	48.945.500,00	44.368.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		55.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.394.800,00	25.394.800,00	22.532.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.498.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu													

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.999.000,00	29.999.000,00	29.999.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	400.000.000,00	263.275.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		600.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Yang Berkualitas	-			-	100 % A Predikat	770.176.638,00	770.176.638,00	770.176.638,00			855.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.557.638,00	155.557.638,00	155.557.638,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	43.160.000,00	43.160.000,00	43.160.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		55.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	571.459.000,00	571.459.000,00	558.956.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		600.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKU PD 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Yang Berkualitas	-			100 Persen	100 % A Predika t	454.487.500,00	454.487.500,00	454.487.500,00			545.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.750.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		45.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	164.360.000,00	164.360.000,00	164.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	247.377.500,00	247.377.500,00	164.626.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		300.000.000,00
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun				68,42 %	68,42 %	55.000.000,00	50.000.000,00	30.200.000,00			60.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dan Mikro Yang Disusun	-			5 Dokumen	34 % 3 Dokumen	55.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			60.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro													
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				10 Orang	3 Orang	55.000.000,00	50.000.000,00	30.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60.000.000,00
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tingkat Kemampuan Tenaga Kerja dan Peserta Pelatihan Kerja menghasilkan produk barang/jasa				23.096 Rp	12.5 %	1.883.735.000,00	1.883.735.000,00	1.772.652.000,00			2.030.000.000,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Peserta Pelatihan Yang Memiliki Kompetensi/Keterampilan	-			9.20 Persen	34 % 52.8 %	1.858.558.000,00	1.858.558.000,00	1.858.558.000,00			2.000.000.000,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				560 Orang	528 Orang	1.858.558.000,00	1.858.558.000,00	1.749.424.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.000.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	-			4,14 Persen	2.5 % 34 %	25.177.000,00	25.177.000,00	25.177.000,00			30.000.000,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil													
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	20 Perusahaan	25.177.000,00	25.177.000,00	23.228.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja				34 %	97 %	493.026.100,00	604.026.100,00	467.328.100,00			625.000.000,00
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan informasi	-			200 Lowongan	175 Lowongan 34 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			80.000.000,00
Pelayanan antar Kerja													
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				80 Orang	90 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	14.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30.000.000,00
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				30 Orang	30 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	36.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan informasi	-			950 Orang	1000 Orang 34 %	253.915.000,00	248.915.000,00	248.915.000,00			315.000.000,00
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online													
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				4 Dokumen	4 Dokumen	35.200.000,00	30.200.000,00	12.537.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		40.000.000,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1200 Orang	1400 Orang	68.715.000,00	68.715.000,00	51.085.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		75.000.000,00
Job Fair/Bursa Kerja													
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	143.860.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia Purna Yang Diberikan Fasilitas Perlindungan	-			100 Persen	100 % 34 %	169.111.100,00	285.111.100,00	285.111.100,00			230.000.000,00
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				120 Orang	120 Orang	97.838.600,00	223.838.600,00	181.918.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan													
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				60 Orang	60 Orang	71.272.500,00	61.272.500,00	26.877.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		80.000.000,00
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak				35 %	40 %	2.449.916.300,00	2.434.916.300,00	2.287.901.500,00			2.750.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKU PD 2 : Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Sosial dan Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang menerapkan minimal 3 (tiga) unsur (PP, PKWT & BPJS Ketenagakerjaan) tata kelola perusahaan yang baik	-			40 Persen	24.06 % 45 %	162.905.000,00	152.905.000,00	152.905.000,00			185.000.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan													
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				30 Perusahaan	30 Perusahaan	36.386.000,00	36.386.000,00	35.408.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60.000.000,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	126.519.000,00	116.519.000,00	41.479.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		125.000.000,00

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	IKU PD 2 : Persentase Pekerja yang Mendapatkan Perlindungan Sosial dan Pekerja Yang Mendapatkan Fasilitas Penyelesaian Hubungan Industrial Persentase Fasilitas Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	-			100 Persen	100 % 24.06 %	2.287.011.300,00	2.282.011.300,00	2.282.011.300,00			2.565.000.000,00
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah				30 Perkara	30 Perkara	127.110.500,00	122.110.500,00	63.857.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100.000.000,00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				30 Perkara	30 Perkara	34.170.300,00	34.170.300,00	29.805.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		65.000.000,00
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				11 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		200.000.000,00
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													

RENJA Perubahan 2025 – DISNAKERTRANS

		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				10000 Orang	10000 Orang	2.125.730.500,00	2.125.730.500,00	2.117.351.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.200.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							289.661.500,00	289.661.500,00	261.746.500,00			450.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							289.661.500,00	289.661.500,00	261.746.500,00			450.000.000,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Mandiri				26,31 %	18.75 %	289.661.500,00	289.661.500,00	261.746.500,00			450.000.000,00
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	IKU PD 1 : Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) Jumlah Transmigran Yang mendapatkan informasi Pelatihan Kerja Jumlah Transmigran Yang Menghasilkan Produk Barang/Jasa	-			5 Kawasan Wilayah	160 Orang 24 Orang 34 %	289.661.500,00	289.661.500,00	289.661.500,00			450.000.000,00
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman												
		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				128 Kepala Keluarga	128 Kepala Keluarga	289.661.500,00	289.661.500,00	261.746.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		450.000.000,00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman												
		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				3 Satuan Permukiman	3 Satuan Permukiman	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00
	J U M L A H							12.053.888.223,00	12.318.807.188,00	11.624.381.858,00			13.458.176.100,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun Ketiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar yang merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banjar 2025-2029.

Sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu Restra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Disnakertran Kabupaten Banjar Tahun 2025 bertujuan untuk mengotimalkan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 Disnakertran Kabupaten Banjar. Di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan dan masalah yang perlu diatasi oleh rencana kerja perubahan tersebut.

2. Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk mengarahkan langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan.
3. Penentuan Prioritas: Menentukan prioritas perubahan yang harus diimplementasikan terlebih dahulu berdasarkan urgensi dan dampaknya.
4. Perencanaan Taktis: Rinci langkah-langkah taktis yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran perubahan
5. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan perubahan yang akurat dan efektif.
6. lokasi Sumber Daya: Menentukan anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perubahan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Disnakertran Kabupaten Banjar terhadap Perubahan Renja 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Situasi: Evaluasi situasi saat ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, identifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang perlu diatasi.
2. Tujuan dan Sasaran: menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang serta sasaran yang spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan waktu-batas (SMART) untuk perubahan yang diinginkan.
3. Strategi Perubahan: Merencanakan strategi dan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Yang akan melibatkan perubahan struktural, program pelatihan, peningkatan layanan, atau langkah-langkah lainnya.
4. Kegiatan dan Rencana Aksi: Membuat rencana aksi kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan setiap strategi. Menentukan siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan.
5. Monitoring dan Evaluasi: menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur untuk memantau kemajuan dan keberhasilan

rencana kerja. Serta mengatur sistem untuk mengumpulkan data dan melakukan evaluasi secara berkala.

6. Anggaran: Menentukan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dan sumber pendanaan yang akan digunakan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan kegiatan yang real dilaksanakan berkesesuaian dengan pencapaian target Ranwal RPJMD. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.

Perubahan Renja Disnakertran Tahun 2025 yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan Renja di masa yang akan datang.

Martapura, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banjar,



Hj. ST. MAHMUDAH, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19751108 199903 2 005